

ANALISIS INDEKS PERTUMBUHAN INKLUSIF DI KAWASAN BARAT INDONESIA DAN KAWASAN TIMUR INDONESIA

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana inklusivitas pertumbuhan ekonomi pada 34 provinsi di Indonesia selama 2017-2019 yang diukur melalui indeks pertumbuhan inklusif serta membandingkan inklusivitas pertumbuhan ekonomi antara Kawasan Barat Indonesia (KBI) dengan Kawasan Timur Indonesia (KTI). Penelitian ini menggunakan data yang diperoleh dari BPS, OJK, dan Dirjen Perimbangan Keuangan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah indeks komposit dengan model pendekatan ADB, sedangkan untuk membandingkan keadaan inklusivitas pertumbuhan ekonomi di Kawasan Barat Indonesia dengan Kawasan Timur Indonesia menggunakan Uji One-Way ANOVA. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum indeks pertumbuhan inklusif telah mencapai status yang memuaskan, hanya ada 1 provinsi yang konsisten berada pada status tidak memuaskan yaitu Papua. Inklusivitas pertumbuhan ekonomi yang terjadi di Kawasan Barat Indonesia dengan Kawasan Timur Indonesia memiliki keadaan yang tidak sama di mana setiap kawasan menghadapi permasalahan yang berbeda.

Gedung EKP, Prodi Ekonomi Pembangunan
FEB Unsyiah
Kopelma Darussalam, Banda Aceh, Indonesia - 23111
Telp/Fax: (0651) 7551265
Email: ekapi.ekp@feb.unsyiah.ac.id

©2021 FEB Unsyiah. All rights reserved.

Fika Diaurrochmah ¹

Mahasiswa Ekonomi Pembangunan
Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Universitas Sebelas Maret
E-mail: fikadiaurrochmah@student.uns.ac.id

Mulyanto ²

Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Universitas Sebelas Maret

Keywords:

Indeks Komposit, Pertumbuhan
Inklusif, Kawasan Barat Indonesia,
Kawasan Timur Indonesia

INFORMASI ARTIKEL

Dikirim: Mei 2021
Diterima setelah revisi: Mei 2021
Diterima: November 2021
Dipublikasi: November 2021

¹ Fika Diaurrochmah (*) adalah corresponding author

1. Pendahuluan

Indonesia menjadi bagian dari sekian banyak negara di dunia yang mengadopsi *Sustainable Development Goals* (SDGs) sebagai suatu cita-cita pembangunan. Berbagai aspek masuk ke dalam indikator bagaimana SDGs dikatakan berhasil. Termasuk tujuan di dalamnya yaitu mewujudkan pembangunan ekonomi yang inovatif dan mampu mengentaskan kemiskinan. Dalam aspek perekonomian, hal ini tentu berkaitan erat dengan pertumbuhan ekonomi yang dimiliki suatu negara. Berdasarkan data yang dimiliki oleh BPS, perekonomian Indonesia terus bertumbuh. Namun pertumbuhan ekonomi yang terjadi belum mengindikasikan ratanya kue pembangunan ekonomi. Berbeda dengan negara maju yang mengidentikkan pembangunan ekonomi dengan laju pertumbuhan ekonomi yang diukur melalui PDB, negara-negara berkembang terutama Indonesia yang penduduknya heterogen menilai pembangunan ekonomi dari tingkat kesejahteraan yang merata melalui beragam indikator. Untuk mencapai kesejahteraan tersebut, pertumbuhan ekonomi haruslah bersifat inklusif. Pertumbuhan ekonomi inklusif menandai adanya kualitas dari suatu pertumbuhan ekonomi negara. Pembangunan yang dilakukan harus menyentuh kalangan menengah ke bawah agar pertumbuhan dapat dikatakan inklusif.

Pertumbuhan ekonomi dapat dikatakan inklusif jika manfaat dari pertumbuhan ekonomi tersebut tidak hanya memberikan peluang pada aspek ekonomi, melainkan juga perlu adanya kepastian dalam perluasan akses dan kesempatan bagi seluruh golongan masyarakat, terlebih bagi masyarakat yang miskin (Ali and Son, 2007). *World Economic Forum* (WEF) mendefinisikan ekonomi inklusif sebagai suatu strategi untuk meningkatkan kinerja perekonomian dengan perluasan kesempatan dan kemakmuran ekonomi, serta memberi akses yang luas pada seluruh lapisan masyarakat. Pertumbuhan inklusif merupakan salah satu misi dari pembangunan berkelanjutan (SDGs), dalam konteks pembangunan ekonomi maka pertumbuhan harus bersifat multidimensi di mana tidak sekadar *pro poor growth* yang hanya berfokus pada pengaruh pertumbuhan terhadap penurunan kemiskinan melainkan menyertakan ukuran di luar pendapatan yang menyiratkan kesejahteraan dan kapabilitas manusia (Sitorus dan Arsani 2018).

Ketimpangan mengindikasikan adanya pertumbuhan ekonomi yang kurang inklusif bagi masyarakat menengah ke bawah (Sholihah *et al.*, 2013). Berdasarkan proyeksi jumlah penduduk Indonesia memiliki 269.603,4 ribu jiwa di mana angka tersebut merupakan jumlah yang cukup besar. Semakin banyak penduduk yang dimiliki oleh suatu wilayah maka semakin besar beban pembangunan ekonomi yang harus ditanggung (Myovella *et al.*, 2020). Heterogenitas perekonomian yang dimiliki oleh Indonesia menyebabkan ketimpangan semakin terlihat jelas dari

bagaimana tingkat pendapatan dari kelas menengah atas dan kelas menengah bawah tidak merata. Hal ini dapat ditunjukkan oleh indeks gini yang dimiliki masing-masing daerah.

Dapat dilihat di Tabel 1 bahwa provinsi-provinsi yang ada di Pulau Kalimantan dan Sulawesi memiliki laju pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi pada tahun 2019 dibanding provinsi-provinsi lain di Indonesia, hanya Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur yang pertumbuhannya di bawah pertumbuhan ekonomi Indonesia. Meskipun demikian, dalam Narasi RPJMN IV 2020-2024 menunjukkan bahwa kontribusi Pulau Kalimantan dan Sulawesi terhadap PDB Nasional (persen) dalam capaian kumulatif 2015-2018 masih relatif kecil yaitu hanya 8,07 dan 6,28 apabila dibandingkan dengan kontribusi Pulau Sumatera dan Jawa yang mencapai 21,53 dan 58,29. Peringkat pemerataan pendapatan yang diukur dari indeks gini menunjukkan provinsi yang memiliki ketimpangan pendapatan paling tinggi adalah DI Yogyakarta sedangkan tingkat pemerataan pendapatan paling tinggi dimiliki oleh Kepulauan Bangka Belitung. Adapun persentase penduduk miskin paling banyak didominasi oleh provinsi-provinsi yang ada di Kawasan Timur Indonesia (KTI) seperti Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Sulawesi Barat, Maluku, Papua Barat, dan Papua yang memiliki persentase penduduk miskin di atas 10 persen. Berbeda halnya dengan Tingkat Pengangguran Terbuka di mana Provinsi Banten yang masuk ke dalam Kawasan Barat Indonesia memiliki peringkat paling tinggi sebesar 8,11 persen. Fenomena-fenomena tersebut mengindikasikan pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak mampu menjamin permasalahan ekonomi-sosial dapat teratasi.

Tabel 1. Laju PDRB, Indeks Gini, Persentase Penduduk Miskin, dan TPT Menurut Provinsi di Indonesia Tahun 2019

No	Provinsi	Laju PDRB (%)	Indeks Gini	Penduduk Miskin (%)	TPT (%)
1	Aceh	4,15	0,32	15,01	6,20
2	Sumatera Barat	5,22	0,32	8,63	5,33
3	Sumatera Utara	5,05	0,31	6,29	5,41
4	Riau	2,84	0,33	6,90	5,97
5	Jambi	4,40	0,32	7,51	4,19
6	Sumatera Selatan	5,71	0,34	12,56	4,48
7	Bengkulu	4,96	0,33	14,91	3,39
8	Lampung	5,27	0,33	12,30	4,03
9	Kep. Bangka Belitung	3,32	0,26	4,50	3,62
10	Kep. Riau	4,89	0,34	5,80	6,91
11	DKI Jakarta	5,89	0,39	3,42	6,22
12	Jawa Barat	5,07	0,40	6,82	7,99
13	Jawa Tengah	5,41	0,36	10,58	4,49
14	DI Yogyakarta	6,60	0,43	11,44	3,14
15	Jawa Timur	5,52	0,36	10,20	3,92
16	Banten	5,53	0,36	4,94	8,11

No	Provinsi	Laju PDRB (%)	Indeks Gini	Penduduk Miskin (%)	TPT (%)
17	Bali	5,63	0,37	3,61	1,52
18	NTB	4,01	0,37	13,88	3,42
19	NTT	5,20	0,36	20,62	3,35
20	Kalimantan Tengah	5,00	0,32	7,28	4,45
21	Kalimantan Barat	6,16	0,34	4,81	4,10
22	Kalimantan Selatan	4,08	0,33	4,47	4,31
23	Kalimantan Timur	4,77	0,34	5,91	6,09
24	Kalimantan Utara	6,91	0,29	6,49	4,40
25	Sulawesi Utara	5,66	0,38	7,51	6,25
26	Sulawesi Tengah	7,15	0,33	13,18	3,15
27	Sulawesi Selatan	6,92	0,39	8,56	4,97
28	Sulawesi Tenggara	6,51	0,39	11,04	3,59
29	Gorontalo	6,41	0,41	15,31	4,06
30	Sulawesi Barat	5,66	0,37	10,95	3,18
31	Maluku	5,57	0,32	17,65	7,08
32	Maluku Utara	6,13	0,31	6,91	4,97
33	Papua Barat	2,66	0,38	21,51	6,24
34	Papua	-15,72	0,39	26,55	3,65
35	INDONESIA	5,02	0,38	9,22	5,28

Sumber: Badan Pusat Statistik Indonesia, 2020

Indikator utama dalam pertumbuhan inklusif yang terdiri dari variabel kemiskinan, ketimpangan, serta lapangan kerja perlu didukung dengan variabel-variabel lain yang mampu membentuk pembangunan ekonomi inklusif. Mckinley (2010) melakukan penelitian yang memasukkan indikator lain selain indikator utama untuk mengukur pertumbuhan inklusif agar menjadi lebih obyektif melalui metode indeks komposit. Banyaknya indikator yang digunakan maka indeks yang terbentuk akan menjadi lebih sesuai dengan kondisi di setiap daerah. Indikator yang digunakan dalam metode indeks komposit ini tidak bersifat absolut atau dapat disesuaikan dengan kondisi daerah dan ketersediaan data selama dalam pengukurannya masih relevan.

Penelitian serupa dengan topik inklusivitas pertumbuhan ekonomi telah dilakukan oleh beberapa peneliti. Vellala et al., (2016) mengukur inklusivitas pertumbuhan di India yang menghasilkan temuan bahwa tiap provinsi di India memiliki inklusivitas yang berbeda. Kusumaningrum dan Yuhan pada tahun 2019 melakukan penelitian mengenai indeks komposit pertumbuhan inklusif di 33 provinsi. Hasilnya menunjukkan bahwa pada tahun 2016 belum ada provinsi yang mencapai Indeks Komposit Pertumbuhan Inklusif (IKPI) dengan kategori unggul. Dari 33 provinsi, 31 di antaranya mencapai kategori memuaskan sedangkan 2 provinsi lainnya yaitu Papua dan NTT berada pada kategori kurang memuaskan. Selain itu, Sitorus dan Arsani (2018) mengukur indeks pertumbuhan inklusif melalui tiga (3) metode pendekatan yaitu ADB, WEF, dan UNDP. Hasilnya menunjukkan bahwa terjadi perbaikan inklusivitas di tingkat nasional, baik dilihat dari indikator tunggal maupun indeks komposit. Berdasarkan pendekatan WEF dan

UNDP, Papua dan Papua Barat menjadi provinsi yang inklusivitasnya lebih rendah dibandingkan dengan provinsi yang lain. Sedangkan melalui pendekatan ADB, semua provinsi di Indonesia memiliki indeks pertumbuhan inklusif yang memuaskan selain Papua. Sholihah *et al.* (2013) meninjau fenomena inklusivitas di Kawasan Barat Indonesia dan Kawasan Timur Indonesia yang hasilnya menunjukkan bahwa provinsi yang berada dalam KTI memiliki inklusivitas yang lebih tinggi pada tiap indikator dibandingkan provinsi-provinsi yang ada di KBI. Berbagai penelitian di tingkat nasional telah dilakukan untuk melihat tingkat inklusivitasnya, namun belum banyak yang menguji perbedaan inklusivitas antara KBI dengan KTI. Sehingga tujuan dalam penelitian ini adalah untuk melihat inklusivitas di KBI dan KTI serta menguji perbedaan inklusivitas di antara kedua kawasan tersebut.

2. Tinjauan Teoritis

Pertumbuhan ekonomi menjadi merupakan suatu kenaikan terus menerus dalam produk per kapita atau per pekerja, yang diikuti oleh kenaikan jumlah penduduk dan biasanya disertai juga dengan perubahan struktural (Jhingan, 1994). Pembangunan ekonomi pada umumnya dapat didefinisikan sebagai suatu proses yang menyebabkan kenaikan pendapatan riil per kapita penduduk suatu negara dalam jangka panjang yang disertai oleh perbaikan sistem kelembagaan (Arsyad, 1999: 6). Pembangunan ekonomi memiliki makna yang lebih luas dari pertumbuhan ekonomi. Jika pertumbuhan ekonomi berfokus pada proses peningkatan produksi barang dan jasa dalam kegiatan ekonomi masyarakat, maka pembangunan ekonomi mencakup perubahan tata susunan ekonomi masyarakat atau dengan kata lain oleh dan untuk siapa pertumbuhan ekonomi tersebut dilakukan. Pembangunan harus dipandang sebagai suatu proses multidimensional yang melibatkan perubahan-perubahan mendasar atas struktur sosial, sikap-sikap masyarakat, dan institusi-institusi nasional, di samping telah mengejar akselerasi pertumbuhan ekonomi, penanganan ketimpangan pendapatan, serta pengentasan kemiskinan (Todaro & Smith, 2003: 21).

Klasen (2010) mendefinisikan pertumbuhan inklusif sebagai pertumbuhan yang mampu menurunkan disparitas antar kelompok. Konsep pertumbuhan inklusif merupakan pengembangan dari pertumbuhan *pro-poor* yang lebih dulu hadir dan digunakan sebagai salah satu kebijakan di negara-negara berkembang (Ali and Son, 2007). Ali dan Son (2007) menjelaskan bahwa perubahan konsep dari pertumbuhan *pro-kemiskinan* menjadi pertumbuhan inklusif perlu dilakukan sebab tujuan utama dari pembangunan adalah kesejahteraan masyarakat di mana tidak hanya kemiskinan sebagai tolak ukur mengukur kesejahteraan melainkan banyak faktor yang lebih kompleks seperti ketimpangan.

3. Metodologi Penelitian

Hampir seluruh data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang bersumber dari Badan Pusat Statistik. Selain itu, data posisi kredit diperoleh dari Otoritas Jasa Keuangan, sedangkan data persentase belanja berdasarkan fungsi diperoleh dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan. Data-data tersebut mencakup 34 provinsi yang ada di Indonesia. Dalam penghitungan indeks komposit, indikator tunggal yang digunakan mengacu pada penelitian McKinley, namun karena terdapat beberapa indikator yang tidak tersedia datanya maka dilakukan modifikasi dengan menggunakan indikator pengganti yang masih relevan dalam penelitian. Fokus dari penelitian ini adalah mengukur inklusivitas pertumbuhan ekonomi selama 3 tahun sejak 2017 hingga 2019 baik tingkat provinsi, kawasan maupun secara nasional serta mendeskripsikan peran masing-masing indikator dalam membentuk indeks pertumbuhan inklusif. Pembagian kawasan berdasarkan pada Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2002 tentang Dewan Pengembangan Kawasan Timur Indonesia yang terdiri dari provinsi-provinsi yang ada di Pulau Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua.

a. Indeks Pertumbuhan Inklusif

1) Normalisasi Data Awal

Variabel atau indikator yang digunakan dalam penelitian ini memiliki satuan yang berbeda, sehingga perlu dilakukan normalisasi data ke dalam satuan yang setara yaitu skala 0 sampai 1. Selain itu, terdapat perbedaan pengaruh atau sifat indikator terhadap pertumbuhan ekonomi yaitu negatif atau positif, maka formula yang digunakan pun berbeda antara indikator yang berpengaruh positif dengan indikator yang berpengaruh negatif.

a) Untuk variabel yang memiliki pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi:

$$Z_{ij} = 10 \left[\frac{X_{ijk} - X_{ij(\min)}}{X_{ij(\max)} - X_{ij(\min)}} \right] \quad (1)$$

b) Untuk variabel yang memiliki pengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi:

$$Z_{ij} = 10 \left[\frac{X_{(\max)} - X_{ijk}}{X_{ij(\max)} - X_{ij(\min)}} \right] \quad (2)$$

Z adalah nilai indikator yang akan dinormalisasi, *X_i* menunjukkan nilai subdimensi/variabel, *j* menunjukkan indikator, *k* menunjukkan observasi, *X_{min}* menunjukkan nilai minimum, dan *X_{max}* menunjukkan nilai maksimum

2) Penentuan Bobot Variabel

Penghitungan variabel yang memiliki lebih dari satu indikator maka nilainya didapatkan dengan menghitung rata-rata dari indikator-indikator penyusunnya. Penghitungan rata-rata menggunakan nilai bobot yang sama untuk setiap indikatornya. Dimensi ekonomi terdiri dari subdimensi/variabel pertumbuhan ekonomi, ketenagakerjaan, dan infrastruktur ekonomi yang masing-masing diberi bobot 25, 15, dan 10 persen. Dimensi kemiskinan dan kesetaraan memiliki 3 subdimensi yaitu kemiskinan, ketimpangan, dan gender yang diberi bobot 10, 10, dan 5 persen. Dimensi kapabilitas manusia terdiri dari subdimensi kesehatan, pendidikan, serta air dan sanitasi yang memiliki bobot masing-masing 5 persen. Dimensi perlindungan sosial memiliki bobot 10 persen. Pemberian bobot tersebut berdasarkan rumusan yang dilakukan oleh Mckinley (2010).

3) Penghitungan Nilai Indeks Subdimensi

$$I_{ij} = \sum_{k=1}^n w_{ij} z_{ij} \quad (3)$$

w menunjukkan bobot subdimensi/variabel

4) Penghitungan Nilai Indeks Pertumbuhan Inklusif (IPI)

$$IPI = \sum_{k=1}^n I_i \quad (4)$$

I menunjukkan nilai indeks subdimensi

5) Pengkategorian

Tabel 2. Klasifikasi Skor Capaian IPI

Skor	<4	4-7	8-10
Capaian	Kurang Memuaskan	Memuaskan	Sangat Memuaskan

Sumber: BPS, 2013

b. Evaluasi Kawasan

1) Uji Homogenitas

Uji homogenitas bertujuan untuk mengetahui apakah data yang diperoleh dalam setiap kategorinya memiliki varian yang homogen atau tidak. Uji homogenitas bertujuan untuk mengetahui apakah data yang diperoleh dalam setiap kategorinya memiliki varian yang homogen atau tidak. Uji homogenitas ini menggunakan uji *Levene Test* pada taraf signifikansi 5% atau $\alpha=0,05$. Hipotesis pengujiannya adalah sebagai berikut:

H_0 : Data yang diuji homogen

H_1 : Data yang diuji tidak homogen

2) Analisis Varian Satu Jalur (*One Way ANOVA*)

One Way ANOVA digunakan untuk mengetahui terjadi tidaknya perbedaan perlakuan atau rata-rata dari setiap perlakuan memiliki hasil yang berbeda atau tidak (Ghozali, 2013). Karena hanya ada satu jenis perlakuan dalam penelitian yang dilakukan, maka uji anova yang digunakan adalah *One Way Anova*. Hipotesis pengujiannya adalah sebagai berikut:

H_0 : Tidak terdapat perbedaan rata-rata dari kedua kawasan

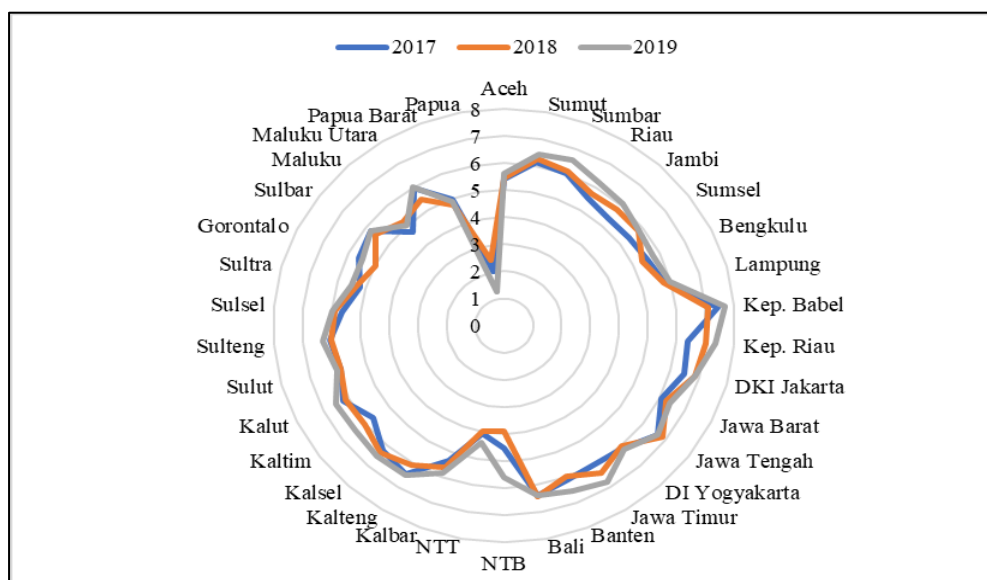
H_1 : Terdapat perbedaan rata-rata dari kedua kawasan

Pengambilan keputusan didasarkan pada nilai probabilitas yang dihasilkan. Dengan taraf signifikansi 5%, apabila nilai probabilitas $> 0,05$ maka H_0 diterima, sedangkan apabila nilai probabilitas $< 0,05$ maka H_0 ditolak.

4. Hasil dan Pembahasan

Capaian Indeks Pertumbuhan Inklusif

Pengukuran Indeks Pertumbuhan Inklusif dengan metode pendekatan ADB menunjukkan kenaikan rata-rata pada Kawasan Barat Indonesia (KBI) selama tahun 2017-2019. Berbeda halnya dengan rata-rata pada Kawasan Timur Indonesia (KTI) maupun secara nasional di mana rata-rata yang dimiliki bersifat fluktuatif selama tiga tahun tersebut. Meskipun bersifat fluktuatif namun perubahannya cenderung konstan dan tidak signifikan. Berdasarkan klasifikasi capaiannya, hampir seluruh provinsi di Indonesia berada di kategori memuaskan selain Provinsi Papua. Hal tersebut ditunjukkan dari rendahnya nilai IPI Provinsi Papua yang berada di bawah angka 4 (empat). Dengan demikian, Provinsi Papua merupakan provinsi dengan nilai indeks terendah baik di KTI maupun nasional.

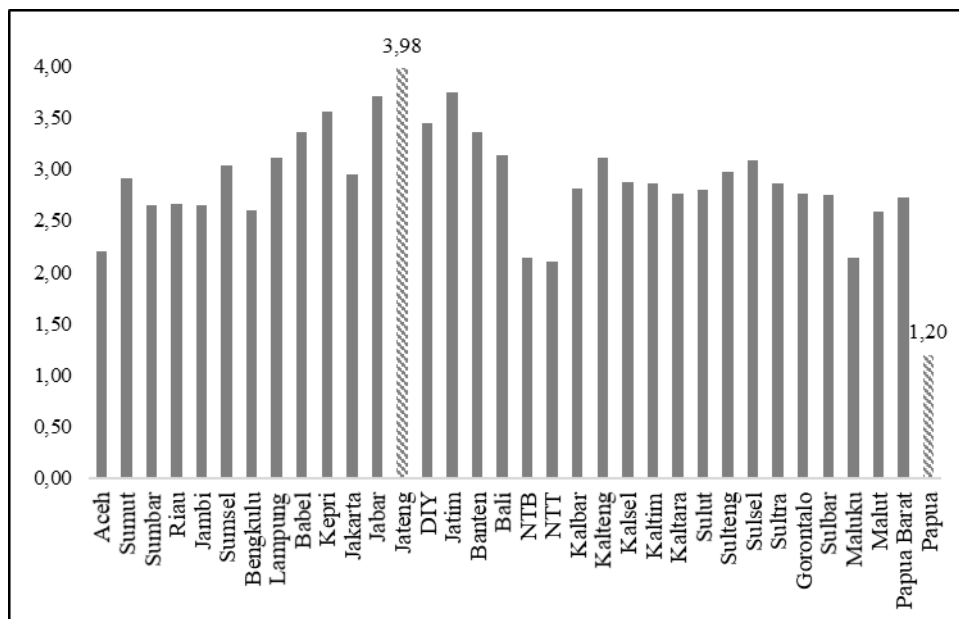


Gambar 1. Indeks Pertumbuhan Inklusif

Hal sebaliknya dimiliki oleh Kepulauan Bangka Belitung. Ketika Papua secara konsisten berada di peringkat terendah selama 3 tahun, Kepulauan Bangka Belitung memperoleh nilai IPI tertinggi berturut-turut selama 2017-2019 meskipun belum berhasil mencapai kategori sangat memuaskan. Sedangkan di KTI yang berhasil mencapai peringkat tertinggi dari rata-rata perolehan IPI selama 3 tahun adalah Kalimantan Selatan dengan peringkat nasional di tempat ketujuh. Hampir seluruh variabel yang dimiliki oleh Papua merupakan yang terendah di antara provinsi lainnya sehingga Papua memperoleh indeks yang sangat rendah. Di lain sisi, Kepulauan Bangka Belitung memiliki skor dimensi kemiskinan dan kesetaraan yang cukup tinggi dibandingkan provinsi lain, sedangkan jika dilihat dari kontribusi terhadap IPI itu sendiri maka dimensi ekonomi memiliki skor yang berkontribusi paling besar.

Dimensi Ekonomi

Nilai rata-rata skor dimensi ekonomi tahun 2017-2019 yang paling tinggi dimiliki oleh Jawa Tengah dengan skor 3,98 sedangkan nilai rata-rata skor yang terendah adalah Papua dengan skor 1,20 sebagaimana ditunjukkan oleh Gambar 2. Dari seluruh indikator yang ada pada dimensi ekonomi, Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) menjadi satu-satunya indikator yang dimiliki oleh Papua di mana perolehannya melebihi nilai yang dimiliki oleh Jawa Tengah. Namun jika dilihat dari indikator lainnya maka angka yang dimiliki oleh Papua jauh lebih rendah dari perolehan Jawa Tengah. Udah dan Ebi (2016) dalam penelitiannya yang berjudul “*Diagnosis of Nigeria Inclusive Growth: A Composite Index Approach*” mengatakan apabila variabel pertumbuhan ekonomi memiliki angka yang kecil maka indeks inklusivitas pertumbuhan ekonomi yang dihasilkan juga relatif kecil.



Gambar 2. Nilai Rata-rata Skor Dimensi Ekonomi 2017-2019

Jika dilihat dari rata-rata selama 3 tahun, pertumbuhan PDRB per kapita Jawa Tengah hanya memperoleh peringkat 10 dari 34 provinsi. Begitu pula dengan TTK dan persentase pengguna telepon seluler yang hanya berada pada peringkat 19 dan 21. Meskipun demikian, 3 indikator lainnya dari dimensi ekonomi yaitu kontribusi sektor manufaktur terhadap total PDRB, persentase tenaga kerja di sektor manufaktur, dan persentase rumah tangga yang menggunakan listrik memiliki angka yang cukup tinggi sehingga menempatkannya pada peringkat 3, 2, dan 3. Di lain sisi, provinsi dengan pertumbuhan PDRB per kapita paling tinggi yaitu Sulawesi Selatan memiliki rata-rata skor dimensi ekonomi 3,08 yang menempatkannya pada peringkat 11 karena nilai indikator lainnya tidak mendukung. Kontribusi sektor manufaktur terhadap total PDRB yang rata-ratanya paling tinggi selama 3 tahun adalah Jawa Barat sebesar 42 persen dan paling rendah adalah Nusa Tenggara Timur dengan 1,28 persen di atas Papua yaitu 2,13 persen.

Pada variabel ketenagakerjaan, TTK yang dimiliki oleh Jawa Tengah secara rata-rata selama 2017-2019 adalah 95,5 persen sedangkan Papua sebesar 96,62 persen. Dengan angka tersebut Papua berhasil mencapai peringkat 6, sementara itu peringkat 1 dimiliki oleh Bali dengan 98,52 persen. Apabila dilihat dari tenaga kerja di sektor manufaktur Jawa Tengah memperoleh 31,23 persen jauh di atas Papua yaitu 5,64 persen yang merupakan peringkat terendah. Kepulauan Riau berhasil menjadi provinsi dengan tenaga kerja di sektor manufaktur yang paling tinggi yang nilainya mencapai 34,18 persen.

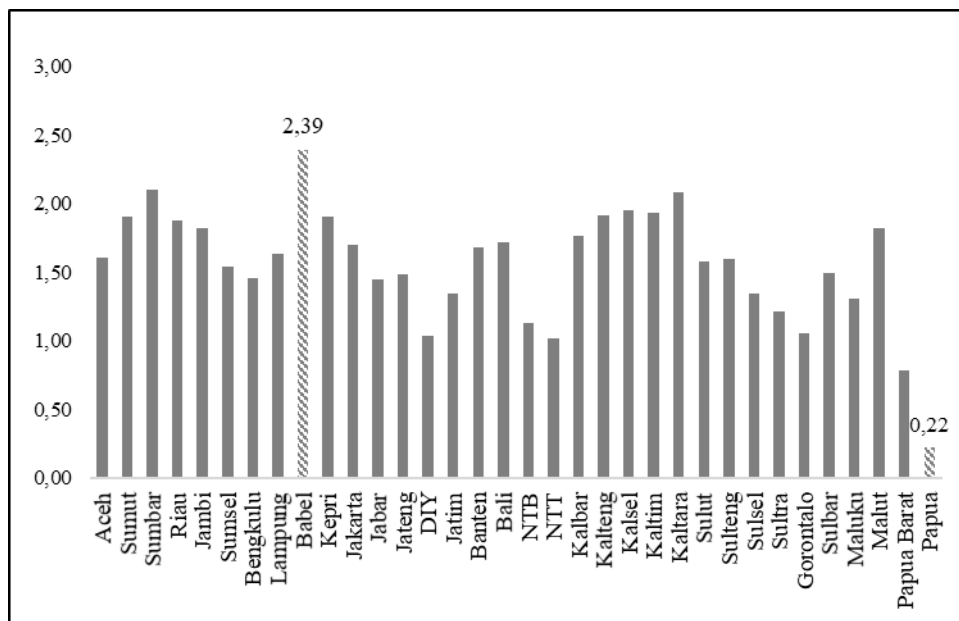
Infrastruktur ekonomi yang dimiliki oleh Jawa Tengah jauh lebih baik dari Papua. Dilihat dari pengguna telepon seluler, Jawa Tengah memiliki nilai 59,92 persen sedangkan Papua hanya mencapai 38,42 persen yang merupakan angka terendah dari provinsi lain. Pada indikator

infrastruktur lainnya, di Jawa Tengah terdapat 99,92 persen rumah tangga yang menggunakan listrik. Berbeda jauh dari Jawa Tengah, Papua hanya memiliki 64,69 persen rumah tangganya yang menggunakan listrik. Dari kedua indikator infrastruktur ekonomi, DKI Jakarta menjadi provinsi yang memperoleh peringkat paling tinggi.

Dimensi Kemiskinan dan Kesenjangan

Dimensi kemiskinan dan kesetaraan menggambarkan keadaan kemiskinan dan ketimpangan yang dilihat dari pendapatan dan gender. Gambar 3 memperlihatkan Kepulauan Bangka Belitung menjadi provinsi dengan nilai rata-rata skor dimensi kemiskinan dan kesetaraan selama 2017-2019 yang paling tinggi yaitu 2,39. Sebaliknya, provinsi dengan nilai rata-rata skor dimensi kemiskinan dan kesetaraan paling rendah adalah Papua dengan perolehan skor 0,22. Selisih skor pada tiap variabel menyebabkan skor yang terbentuk pada dimensi kemiskinan dan kesetaraan menjadi berbeda. Jumlah penduduk miskin di Kepulauan Bangka Belitung hanya sebesar 4,86 persen sedangkan di Papua jumlah penduduk miskinnya merupakan yang terbanyak yaitu 27,25 persen.

Pada variabel ketimpangan pendapatan, Kepulauan Bangka Belitung menjadi provinsi dengan ketimpangan paling rendah selama 3 tahun berturut-turut dengan rata-rata indeks gini 0,27. Meskipun bukan yang terendah, namun Papua memiliki indeks gini yang cukup tinggi yaitu 0,40 sementara DI Yogyakarta sebagai provinsi dengan ketimpangan paling tinggi memiliki indeks gini sebesar 0,43. Hal ini menunjukkan bahwa ketimpangan antara kelompok pendapatan menengah ke atas dengan kelompok pendapatan menengah ke bawah masih tinggi. Hapsari (2019) mengungkapkan bahwa nilai variabel kemiskinan yang diukur melalui persentase penduduk miskin dalam suatu wilayah akan berdampak pada tingkat kesejahteraan.

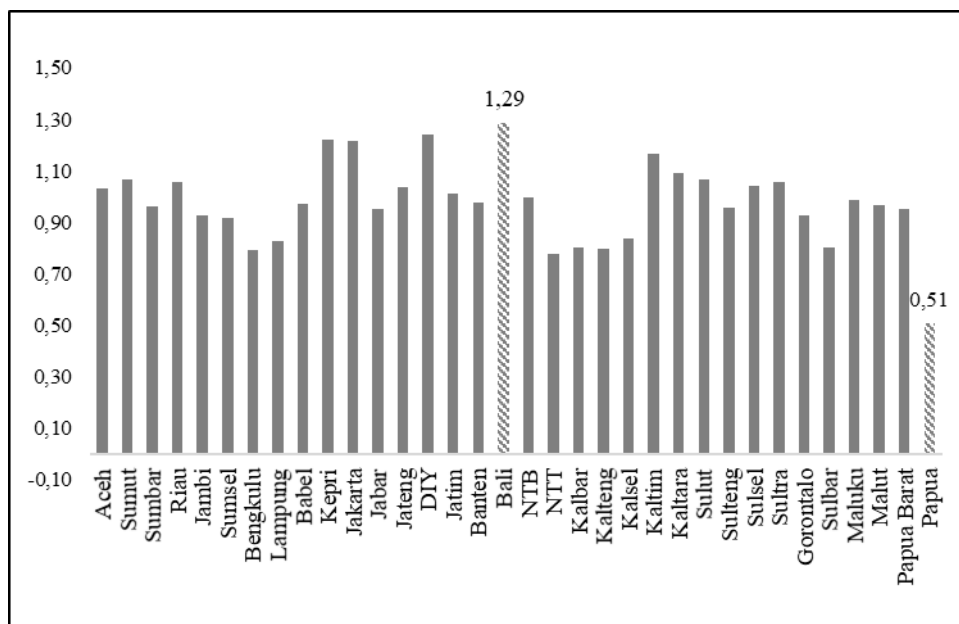


Gambar 3. Nilai Rata-rata Skor Dimensi Kemiskinan dan Kesenjangan 2017-2019

Kesenjangan gender yang diukur melalui pendekatan persentase kelahiran dibantu tenaga kesehatan dan rasio angka melek huruf perempuan terhadap laki-laki di Kepulauan Bangka Belitung bukan merupakan yang tertinggi. Kepulauan Bangka Belitung memiliki rata-rata persentase kelahiran dibantu tenaga kesehatan sebesar 97,97 persen dan berhasil mencapai peringkat 6, namun rata-rata rasio angka melek huruf perempuan terhadap laki-laki terbilang rendah karena hanya menempati peringkat 18 dengan 98,17 persen. Pencapaian Kepulauan Bangka Belitung tersebut masih lebih baik dibanding apa yang dimiliki Papua. Kedua indikator memiliki peringkat yang rendah yaitu 33 dan 34 dengan rata-rata persentase kelahiran dibantu tenaga kesehatan 66,42 persen dan rata-rata rasio angka melek huruf perempuan terhadap laki-laki berada di angka 87,99 persen. DKI Jakarta memiliki nilai indikator gender yang cukup baik sehingga menempatkannya pada peringkat pertama pada variabel gender meskipun jika dilihat dari kedua indikator DKI Jakarta bukan merupakan yang tertinggi namun perolehannya cukup tinggi di peringkat 3. DIY menjadi peringkat pertama pada indikator pendekatan persentase kelahiran dibantu tenaga kesehatan namun pada indikator lainnya peringkat 28. Hal yang serupa juga dimiliki oleh Gorontalo di mana pada indikator rasio angka melek huruf perempuan terhadap laki-laki peringkat pertama namun persentase kelahiran dibantu tenaga kesehatan menempatkannya pada peringkat 12.

Dimensi Kapabilitas Manusia

Kepulauan Bali menjadi provinsi dengan rata-rata skor paling tinggi pada dimensi kapabilitas manusia dengan 1,29 sedangkan Papua menjadi yang terendah dengan 0,51. Dimensi kapabilitas memiliki 3 variabel yaitu kesehatan, pendidikan, serta air dan sanitasi. Dalam variabel kesehatan digunakan pendekatan angka harapan hidup untuk mengukurnya. Bali memperoleh peringkat 7 dengan rata-rata angka harapan hidup 71,72 tahun, sementara peringkat pertama diduduki oleh DI Yogyakarta dengan 74,85 tahun. Meskipun bukan yang terendah namun Papua memiliki angka harapan hidup yang rendah yaitu 65,45 tahun tidak berbeda jauh dengan Sulawesi Barat yang merupakan provinsi dengan angka harapan hidup terendah yaitu 64,62 tahun.



Gambar 4. Nilai Rata-rata Skor Dimensi Kapabilitas Manusia 2017-2019

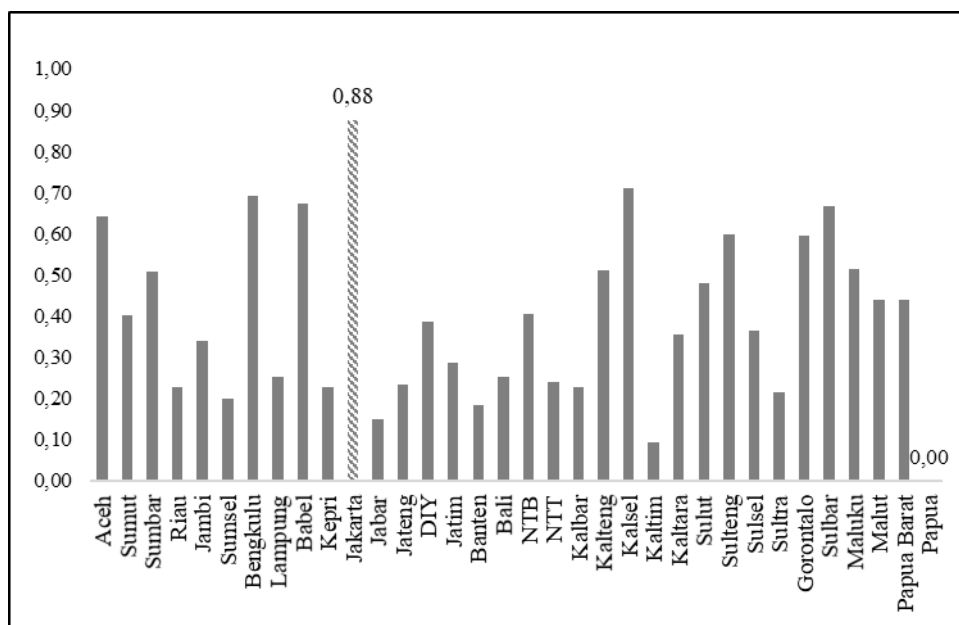
Variabel pendidikan yang dimiliki oleh Bali menunjukkan rata-rata perolehan yang cukup berbeda pada kedua indikatornya. Rata-rata lama sekolah di Bali hanya 8,68 tahun, meskipun begitu APM SMA di Bali merupakan yang tertinggi yaitu 72,8 persen. DKI Jakarta menjadi provinsi dengan rata-rata lama sekolah paling tinggi selama 3 tahun yaitu 11,04 tahun. Di lain pihak, Papua menjadi provinsi yang terendah pada 2 indikator pendidikan dengan rata-rata lama sekolah 6,48 tahun dan APM SMA 44,04 persen. Indikator-indikator tersebut menjadi representasi tingkat pendidikan yang diperoleh oleh masyarakat, sehingga kapabilitas manusia semakin baik apabila tingkat pendidikannya semakin tinggi (Prabandari dan Santoso, 2018).

Tingkat kelayakan air dan sanitasi di Bali menjadi yang paling baik, pasalnya selama 2017-2019 Bali memiliki tingkat presentasi rumah tangga pengguna sumber air layak dan sanitasi layak yang cukup tinggi bahkan beberapa kali menjadi yang paling tinggi. Bertolak belakang dengan Bali, kondisi di Papua sangat memprihatinkan di mana hanya 35,03 persen rumah tangga yang

memiliki sanitasi layak. Tidak berbeda jauh dengan kondisi tersebut, persentase rumah tangga yang menggunakan sumber air bersih di Papua hanya 59,43 persen yang sedikit lebih tinggi dari provinsi dengan rumah tangga pengguna sumber air bersih terendah yaitu Bengkulu sebesar 50,27 persen.

Dimensi Perlindungan Sosial

Nilai rata-rata skor dimensi perlindungan sosial sebagaimana diperlihatkan pada Gambar 5 menunjukkan bahwa nilainya sangat rendah. Penyebab rendahnya nilai tersebut karena pada dimensi ini hanya menggunakan 1 indikator dan bobot yang diberikan 10 persen sehingga skor paling tingginya adalah 1. Pendekatan yang digunakan untuk mengukur dimensi perlindungan sosial adalah realisasi anggaran belanja pemerintah berdasarkan fungsi perlindungan sosial. Indikator tersebut mengukur kredibilitas pemerintah untuk mewujudkan transfer pendapatan dalam upaya perlindungan terhadap kelompok rentan (BAPPENAS, 2014).

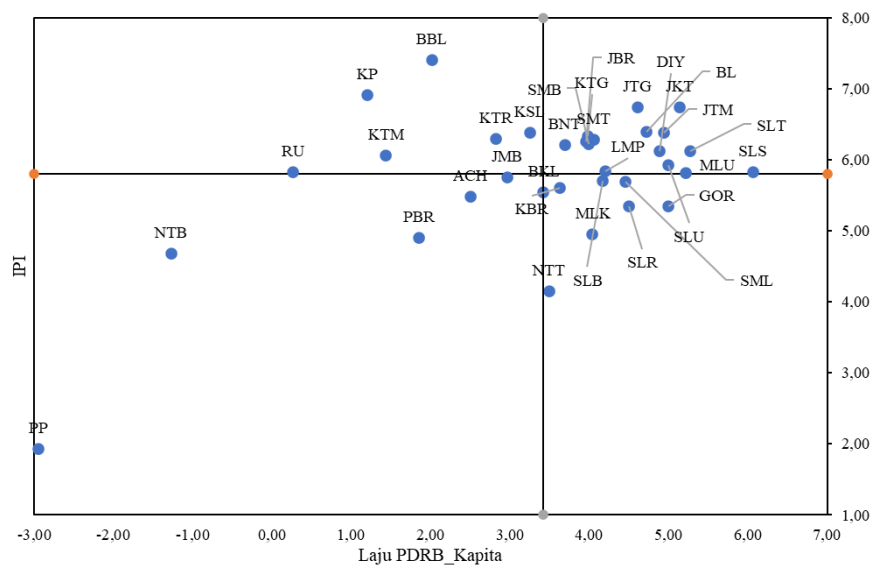


Gambar 5. Nilai Rata-rata Skor Dimensi Perlindungan Sosial 2017-2019

Sama halnya dengan ketiga dimensi lainnya, Papua menjadi yang paling buruk dalam dimensi perlindungan sosial bahkan skornya 0 yang artinya selama 2017-2019 Papua selalu menjadi yang terendah dalam realisasi anggaran belanja pemerintah berdasarkan fungsi perlindungan sosial. Meskipun begitu, terjadi kenaikan pada tahun 2019 di mana besar persentasenya naik dari 0,08 persen menjadi 0,31 persen. Adanya kenaikan tersebut diharapkan terus menerus terjadi agar perlindungan sosial di Papua semakin baik. DKI Jakarta memiliki skor dimensi perlindungan sosial tertinggi di antara provinsi lainnya yaitu 0,88. Dengan rata-rata realisasi anggaran belanja

pemerintah berdasarkan fungsi perlindungan sosial selama 2017-2019 sebesar 2,23 persen menunjukkan bahwa pemerintah setempat telah berupaya untuk mengoptimalkan kinerja perlindungan sosial. Semakin tinggi pengeluaran pemerintah dalam fungsi perlindungan sosial maka membuat pertumbuhan ekonomi semakin inklusif (Ji Long & Pasaribu, 2019). Namun dalam keberjalanan selama 3 tahun tersebut DKI Jakarta mengalami penurunan persentase dari 2018 sebesar 3,12 persen turun menjadi 2,25 persen.

Capaian Inklusivitas Pertumbuhan Ekonomi Berdasarkan Kawasan



Ket: ACH: Aceh; SMT: Sumut; SMB: Sumbar; RU: Riau; JMB: Jambi; SML: Sumsel; BKL: Bengkulu; LMP: Lampung; BBL: Babel; KP: Kepri; JKT: Jakarta; JBR: Jabar; JTG: Jateng; DIY: Yogyakarta; JTM: Jatim; BNT: Banten; BL: Bali; KBR: Kalbar; KTG: Kalteng; KSL: Kalsel; KTM: Kaltim; KTR: Kaltara; SLU: Sulut; SLT: Sulteng; SLS: Sulsel; SLR: Sultra; GOR: Gorontalo; SLB: Sulbar; MLK: Maluku; MLU: Malut; PBR: Pabar; PP: Papua.

Gambar 6. Plot Nilai Rata-rata IPI dan Laju PDRB Kapita 2017-2019

Gambar 6 menunjukkan plot nilai rata-rata IPI dan laju PDRB per kapita selama 2017-2019. Dalam grafik tersebut terdapat 4 kuadran yang terbagi berdasarkan nilai mean IPI 34 provinsi yaitu 5,8 dan nilai mean laju PDRB per kapita 34 provinsi sebesar 3,42. Kuadran I menunjukkan daerah dengan laju PDRB per kapita yang kurang dari nilai meannya namun memiliki IPI lebih dari mean. Provinsi yang masuk ke dalam kuadran I adalah Riau, Kepulauan Riau, Kepulauan Bangka Belitung, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, dan Kalimantan Selatan. Keenam provinsi tersebut memiliki inklusivitas yang cukup baik asalkan diimbangi dengan laju PDRB per kapita yang di bawah rata-rata. Di antara 6 provinsi tersebut 3 merupakan bagian dari KBI dan lainnya adalah provinsi yang ada di KTI.

Kuadran II merupakan wilayah di mana IPI dan laju PDRB per kapita yang dimiliki tiap provinsi lebih dari rata-rata nasional. Sebagian besar provinsi yang ada di kuadran II adalah bagian dari KBI yaitu Sumatera Utara, Sumatera Barat, Lampung, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Banten, Bali, Kalimantan Tengah, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, dan Maluku Utara. Provinsi-provinsi KTI lebih banyak berada di kuadran III dan IV di mana nilai IPI yang diperoleh tidak lebih besar dari mean. Sebanyak 9 provinsi memiliki IPI di bawah mean meskipun laju PDRB per kapita yang dimiliki di atas mean, 7 di antaranya adalah bagian dari KTI yaitu NTT, Kalimantan Barat, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Sulawesi Utara, dan Maluku. Sementara itu, Sumatera Selatan dan Bengkulu yang merupakan bagian dari KBI mengisi sisanya. Kuadran IV menjadi daerah dengan IPI dan laju PDRB di bawah rata-rata dengan 5 provinsi. NTB, Papua Barat, dan Papua menjadi daerah KTI yang berada di kuadran IV sedangkan untuk KBI adalah Aceh dan Jambi.

Tabel 3. Hasil Output Uji *One-Way ANOVA*

	IPI
Homogenitas	
Levene Statistic	3.006
Sig.	0.093*
ANOVA	
F	8.399
Sig.	0.007

Keterangan: * Homogenitas signifikan pada level $\alpha = 5$ persen
 Jika $\alpha = 10$ persen maka model ADB tidak signifikan
 Sumber: Hasil Olahan SPSS Statistics 22

Dominasi provinsi KBI yang berada di kuadran I dan II mengindikasikan bahwa secara umum IPI di KBI lebih tinggi daripada IPI di KTI. Melalui uji *One-Way ANOVA* yang menghasilkan output sebagaimana ditunjukkan oleh Tabel 3 nampak bahwa dengan taraf signifikansi 5 persen terdapat perbedaan rata-rata antara KBI dengan KTI yang menguatkan bahwa KBI memiliki IPI yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan IPI di KTI. Hal ini dikuatkan oleh Kusumaningrum dan Yuhan (2019) yang menemukan bahwa Indeks Pertumbuhan Inklusif dengan nilai terendah didominasi oleh provinsi-provinsi di KTI.

Indeks pertumbuhan inklusif yang lebih tinggi di KBI menunjukkan bahwa pembangunan yang terjadi di KTI masih belum cukup untuk menyentuh semua golongan dari berbagai dimensi. Ketimpangan yang tinggi antar kawasan di setiap dimensi menunjukkan pembangunan hanya berfokus pada wilayah tertentu. Di lain sisi, pembangunan yang dilakukan masih berorientasi pada pertumbuhan ekonomi tanpa mempertimbangkan dampak besarnya kepada pembangunan di aspek lainnya.

5. Kesimpulan dan Implikasi Kebijakan

Kesimpulan

Indeks pertumbuhan inklusif yang dihitung berdasarkan indeks komposit dengan pendekatan model ADB di Indonesia selama 2017-2019 menunjukkan bahwa tidak ada provinsi yang berhasil mencapai kategori sangat memuaskan. Papua menjadi satu-satunya provinsi yang selama 3 tahun konsisten berada pada kategori IPI tidak memuaskan. NTT dan NTB memperoleh IPI tidak memuaskan pada tahun 2018 namun secara rata-rata selama 3 tahun kedua provinsi tersebut berada pada kategori IPI memuaskan. Secara umum, terdapat perbedaan rata-rata IPI di KBI dengan KTI di mana IPI di KBI lebih tinggi dibanding IPI di KTI.

Implikasi Kebijakan

Pemerintah daerah di provinsi yang menjadi bagian dari KBI membutuhkan peningkatan kesempatan kerja dan produktivitas tenaga kerja, serta perluasan akses untuk pemerataan gender. Banyaknya sumber daya manusia yang tersedia di KBI membutuhkan kesempatan kerja yang lebih luas. Adapun tugas pemerintah pusat dan pemerintah daerah di KTI masih cukup banyak terkait kemiskinan yang masih tinggi dan juga rendahnya kualitas sumber daya manusia. Sebagai upaya untuk mengatasi permasalahan kemiskinan, maka prioritas utama bagi pemerintah di KTI adalah memberikan fasilitas kesehatan dan pendidikan agar memperbaiki kualitas sumber daya manusia yang dimilikinya. Pemerintah perlu memastikan hasil pembangunan dan distribusi manfaat dari pertumbuhan ekonomi menyentuh pada semua aspek.

Daftar Pustaka

- Ali, I., & Son, H. . (2007). Measuring Inclusive Growth. *Asian Development Review*, 24(1), 11–31.
- Arsyad, L. (1999). Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah Edisi Pertama. In *BPFE UGM*. <http://repository.ut.ac.id/3975/1/ESPA4324-M1.pdf>
- BAPPENAS. (2014). Perlindungan Sosial di Indonesia: Tantangan dan Arah Ke Depan. In *Bappenas*. BAPPENAS RI.
- Ghozali, I. (2013). Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21 Update PLS Regresi. In *Badan Penerbit Universitas Diponegoro*.
- Hapsari, W. R. (2019). Analisis Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Litbang Sukowati*, 3(1), 106–116. <https://doi.org/10.32630/sukowati.v3i1.121>
- Jhingan, M. L. (1994). *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. PT Rajagrafindo Persada.
- Ji Long, T., & Pasaribu, E. (2019). Analisis Spasial Determinan Pertumbuhan Inklusif

- Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017. *Seminar Nasional Official Statistics*, 2019(1), 416–423. <https://doi.org/10.34123/semnasoffstat.v2019i1.11>
- Klasen, S. (2010). Measuring and Monitoring Inclusive Growth: Multiple Definitions, Open Questions, and Some Constructive Proposals. In *ADB Sustainable Development Working Paper Series* (Issue 12). <https://doi.org/10.1332/policypress/9781447332497.003.0006>
- Kusumaningrum, S., & Yuhan, R. J. (2019). Pertumbuhan Ekonomi Provinsi di Indonesia Berdasarkan Indeks Komposit Pertumbuhan Inklusif dan Faktor yang Memengaruhinya. *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik*, 10(1), 1–17. <https://doi.org/10.22212/jekp.v10i1.1150>
- Mckinley, T. (2010). ADB Sustainable DevInclusive Growth Criteria and Indicators : An Inclusive Growth Index for Diagnosis of Country Progress. *ADB Sustainable Development Working Paper Series*, 14.
- Myovella, G., Karacuka, M., & Haucap, J. (2020). Digitalization adna Economic Growth: A Comparative Analysis of Sub-Saharan Africa and OECD Economies. *Telecommunications Policy*, 44(2), 101856. <https://doi.org/10.1016/j.telpol.2019.101856>
- Prabandari, D. A. N., & Santoso, D. B. (2018). Analisis Inklusivitas Pertumbuhan Ekonomi Di Jawa Timur Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Universitas Brawijaya*, 12.
- Sholihah, D. H. A., Hutagaol, M. P., & Asmara, A. (2013). Pertumbuhan Inklusif : Fenomena Pertumbuhan Inklusif di Kawasan Indonesia Bagian Barat dan Indonesia Bagian Timur. *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Pembangunan*, 2(2), 85–112.
- Sitorus, A. V. Y., & Arsani, A. M. (2018). A Comparative Study of Inter-Provincial Inclusive Economic Growth in Indonesia 2010-2015 with Approach Methods of ADB, WEF, and UNDP. *Urnal Perencanaan Pembangunan: The Indonesian Journal of Development Planning*, 2(1), 64–77. <https://doi.org/10.36574/jpp.v2i1.32>
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2003). *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*. Penerbit Erlangga.
- Udah, E. B., & Ebi, B. O. (2016). Diagnosis of Nigeria Inclusive Growth : A Composite Index Approach. *British Journal of Economics, Finance and Management Sciences*, 12(2), 49–58.
- Vellala, P. S., Madala, M. K., & Chhatopadhyay, U. (2016). The Development of Composite Index for Inclusive Economic Growth: An Indian Perspective. *International Journal of Economic Perspectives*, 10(4), 454–471.